

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang mengalami hambatan dalam menghadapi lingkungan dan sikap masyarakat serta berhak atas persamaan hak (peraturan perundang-undangan) yang mungkin menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif (Indonesia 2016). Penyandang disabilitas harus diberi ruang dan status yang sama dengan masyarakat umum (yaitu mereka yang tidak memiliki disabilitas). Namun pada kenyataannya, perhatian terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Itulah pengalaman orang buta. Penyandang disabilitas masih dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang memalukan atau hal-hal yang tidak nyaman, membuat keluarga menjadi kurang transparan mengenai kendala mereka ditemui oleh sanak saudara. Hal ini membuat orang menjadi cacat tidak cukup ruang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan seumur hidup individu.

Menurut penelitian Heller yang dikutip dari (Dwi, 2020) individu dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal komunikasi. Selain itu, Heller membagi paradigma disabilitas menjadi delapan kategori: 1) model medis, yang memandang disabilitas sebagai suatu penyakit dan kegagalan fungsi. 2) Modus patologi sosial, di mana

individu penyandang disabilitas dipandang kurang beruntung dan bergantung pada pemerintah atau masyarakat. untuk bantuan keuangan, yang dipandang sebagai sebuah anugerah dan bukan 3) model supercrip, yang mana orang yang cacat digambarkan sebagai orang yang tidak normal karena prestasinya yang "manusia super" atau sebagai orang yang "istimewa" karena mereka mampu menjalani kehidupan biasa meskipun mereka cacat; 4) model hak-hak sipil/minoritas, di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai anggota komunitas penyandang disabilitas yang memiliki keluhan yang sah berdasarkan undang-undang hak-hak sipil; 5) model pluralis budaya dimana penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang kompleks dan tidak mendapat perhatian yang berlebihan; 6) model korporat, yang menggambarkan individu penyandang disabilitas dan aksesibilitas sosial mereka sebagai hal yang merugikan bagi dunia usaha pada khususnya serta masyarakat pada umumnya; 7) model hukum yang menggambarkan penyandang disabilitas mempunyai hak dan mungkin perlu mengajukan tuntutan hukum untuk mengakhiri diskriminasi; 8) Model konsumen, yang memandang penyandang disabilitas sebagai segmen pasar yang kurang terlayani dan karenanya memandang pemberian akses sosial kepada mereka sebagai hal yang menguntungkan bagi dunia usaha.

Di kalangan penyandang disabilitas, dunia digital tentunya masih merupakan hal baru dan banyak yang belum sepenuhnya menyadarinya. Sebab, penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam

menggunakan gadget. Penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari karena adanya kendala yang dihadapi. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang aneh bagi penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan media digital bagi penyandang disabilitas memerlukan sejumlah langkah untuk memodifikasi sistem media agar lebih mudah diakses oleh mereka (Akhsan Fuad 2020). Aturan legislatif juga melindungi hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Salah satu hak atas informasi merupakan salah satu hak hukum yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Menurut Pasal 24 UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas berhak atas komunikasi dan informasi melalui media yang dapat diakses dan diperoleh (Prestianta, Mardjianto, and Ignatius 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak menggunakan berbagai situs berita di era internet modern dan digital untuk memperoleh informasi yang mudah dijangkau. Namun hal ini tidak dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Desa Sidoharjo yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mendapat julukan sebagai kampung idiot karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Ponorogo sebagai penyandang disabilitas. Faktanya, Ponorogo memiliki lima permukiman yang tergolong permukiman Idiot. Desa Dayakan, Desa Kreet, Desa Sidoharjo, dan Kecamatan Badegan. Kemudian di Kecamatan Balong terdapat Desa Karangpatihan dan Pandak. Desa

Sidoharjo, salah satu dari lima desa yang disebutkan sebelumnya, memiliki persentase penderita keterbelakangan mental tertinggi (Ayuningtias 2018).

Berdasarkan data pemerintah Desa Sidoharjo penyandang disabilitas saat ini yaitu 316 warga yang mengalami keterbelakangan mental (Ayuningtias 2018). Bukan suatu kebetulan jika ada orang idiot yang tinggal di Desa Sidoharjo dan masyarakat sekitarnya. Kondisi yang terjadi di Desa Sidoharjo ini dikarenakan letak geografis wilayah yang berada di bawah gunung Rijekwesi dengan kondisi tanah yang tandus. Keadaan wilayah tersebut tidak memungkinkan masyarakat untuk menanam padi, masyarakat hanya mengandalkan ketela pohon untuk dikonsumsi sehari-hari. Tanaman seperti padi dan jagung hanya dapat ditanam pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan masyarakat mengalami kekurangan gizi yang mengakibatkan keturunan mereka tidak mendapatkan gizi yang cukup sehingga tingkat kecerdasan menurun. Penduduk desa yang rata-rata memiliki usia 35-50 tahun tidak pernah mengenal dunia digital karena belum pernah dikenalkan dengan media digital oleh orang terdekat atau pemerintah desa (Ayuningtias 2018).

Pemerintah desa Sidoharjo telah melakukan beberapa pelatihan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, penyandang disabilitas ini masih tergolong dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang memiliki hambatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan fungsi sosial secara wajar serta terhambatnya pemenuhan kebutuhan baik secara jasmani dan rohani. Pelatihan yang dilakukan bukan merupakan pengenalan media digital kepada penyandang disabilitas tetapi sebagai cara untuk penyandang disabilitas menjadi mandiri dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan agar dapat menjalankan kehidupan tanpa mengandalkan orang lain secara terus menerus. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat selain pelatihan juga penyandang disabilitas dipekerjakan pada sektor pertanian yang ada di Desa Sidoharjo. Mereka membantu membajak sawah, mencari rumput dan kerajinan tangan (Hanif and Santoso 2018).

Dampak dari ketertinggalan media digital penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo ini yaitu masyarakat tidak mengetahui perkembangan dunia luar. Dengan demikian masyarakat menjadi sulit berkembang dan tidak memiliki inovasi yang dapat dikembangkan sendiri. Usia penyandang disabilitas yang sudah tidak produktif lagi mengakibatkan mereka rentan terhadap beberapa penyakit. Tingkat sumber daya manusia yang mendampingi para penyandang disabilitas juga menjadi penentu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KESIAPAN MASYARAKAT MENUJU DIGITALISASI DI

- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi perangkat desa dalam membuat kebijakan tentang digitalisasi bagi masyarakat disabilitas.

E. Penegasan Istilah

1. Disabilitas

Istilah difabel adalah kepanjangan dari *Differently abled people* atau seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan kemampuan yang berbeda itulah yang memperlambat aktivitas pada penyandang difabel dikarenakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh individu tersebut. Disabilitas merupakan gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Selain itu disabilitas merupakan ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk bersosialisasi secara menyeluruh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Philona and Listyaningrum 2021).

Pembagian umum kategori difabel atau disabilitas adalah:

- a. Difabel intelektual, yaitu keterbatasan/retardasi mental, kebalikan dari akselerasi, dalam bahasa Inggris disebut juga *slow learner*.

- b. Difabel mobilitas, yaitu hambatan yang ada pada tubuh, seperti gangguan motorik ferak tubuh, autis paraplegia.
- c. Difabel komunikasi, yaitu gangguan pada pendengaran dan wicara.
- d. Difabel sensorik, yaitu gangguan pada penglihatan total atau low vision.
- e. Difabel psikososial, yaitu orang dengan gangguan jiwa.

Istilah difabel sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1998 yang digunakan sebagai sebutan untuk penyandang individu yang mengalami kelainan fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, seseorang dianggap cacat jika mempunyai kelainan fisik atau gangguan kesehatan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kategori ini mencakup penyandang disabilitas dan disabilitas fisik. Meski demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan cacat merujuk pada barang atau benda mati yang bukan diciptakan Tuhan. Tentunya manusia tidak ada yang diciptakan tuhan dalam keadaan tersebut (Bangun 2016).

2. Dunia Digital

Era digital adalah era di mana informasi dapat diperoleh dan dibagikan dengan cepat dan mudah berkat teknologi digital. Sebaliknya, teknologi digital memanfaatkan sistem komputerisasi sehingga dapat mengakses internet (Lintang Citra Christiani, Ikasari, and Nisa 2020). Teknologi dan era digital adalah dua hal yang tidak

pernah berhenti bekerja. Masyarakat secara bersama-sama dan saling mempengaruhi dan mudah menyerap informasi dari berbagai sumber.

F. Landasan teori

Teori Kesiapan Masyarakat

Menurut (Kurniati, 2015) kesiapan masyarakat dapat diukur dari aspek iklim masyarakat, kapasitas masyarakat, dan akses masyarakat. Iklim masyarakat meliputi tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Kapasitas masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya masyarakat. Akses masyarakat meliputi tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan.

Menurut (Edwards et al., 2000) menjelaskan dalam konsepnya yang disebut sebagai Community Readiness bahwa jika tingkat kesiapan masyarakat belum tercapai, pelaksanaan program atau proyek pembangunan akan menghadapi hambatan. Jika masyarakat belum siap untuk program atau proyek pembangunan, maka hal tersebut dapat menghambat progres. Kegagalan bisa terjadi jika program atau proyek tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan kesiapan masyarakat. Namun, jika kesiapan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan program atau proyek, maka efektivitas dan manfaat yang diinginkan dapat dicapai. Namun, karena kesiapan masyarakat tidak terjadi secara seketika, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam mempersiapkan masyarakat.

Terdapat beberapa model teoritis yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Tahap pengetahuan: Pada tahap ini, seseorang atau sekelompok orang mendapatkan informasi tentang perubahan yang akan terjadi.
2. Tahap sikap: Pada tahap ini, seseorang atau sekelompok orang mulai memformulasikan pendapat dan mempertimbangkan manfaat dan kerugian perubahan.
3. Tahap persiapan: Pada tahap ini, seseorang atau sekelompok orang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. Mereka mulai membuat rencana untuk menghadapi perubahan tersebut dan mulai mengambil tindakan nyata untuk menghadapi perubahan tersebut.
4. Tahap implementasi: Pada tahap ini, seseorang atau sekelompok orang sudah siap untuk menghadapi perubahan tersebut dan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebuah model teori kesiapan masyarakat dapat digunakan untuk menentukan kemampuan individu atau kelompok untuk mengatasi perubahan atau inovasi baru. Ini dapat membantu dalam menentukan strategi yang efektif untuk memperkenalkan perubahan ke masyarakat.

Menurut (Kurniati, 2015) kapasitas masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya masyarakat. Kapasitas masyarakat yang tinggi akan mendukung masyarakat untuk menghadapi perubahan. Sebaliknya, kapasitas masyarakat yang rendah akan

menyulitkan masyarakat untuk menghadapi perubahan. Beberapa variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui kesiapan masyarakat dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang masalah yang dihadapi

Peneliti dapat mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dihadapi dan menilai kemampuan masyarakat dalam memberikan jawaban yang tepat.

2. Kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia

Peneliti dapat mengetahui kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang tersedia dengan mengamati bagaimana masyarakat menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

3. Kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak lain

Peneliti dapat mengetahui kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak lain dengan mengamati bagaimana masyarakat menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan pihak lain yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Peneliti dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengamati bagaimana

masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

5. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan masalah yang dihadapi

Peneliti dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan masalah yang dihadapi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang kepercayaan masyarakat terhadap pihak terkait dan menilai jawaban yang diberikan.

Sebagaimana dirumuskan oleh (Edwards et al., 2000) model kesiapan masyarakat diciptakan untuk menilai reaksi masyarakat terhadap tindakan kebijakan, program, atau proyek. Berikut adalah sembilan tahapan kesiapan masyarakat :

1. Tidak ada kesadaran (No Awareness): Masyarakat umumnya tidak menyadari masalah sebagai masalah
2. Penolakan (Denial): Hanya sejumlah kecil elemen masyarakat yang mengenal isu
3. Tidak Sadar (Vague Awareness): Sedikit yang menyadari potensi lokal dan minimnya informasi tentang program atau kegiatan
4. Persiapan (Preparation) : Masyarakat mulai berorganisasi
5. Perencanaan Awal (Preplanning) : Pemahaman jelas mengenai masalah lokal dan tindakan yang diambil

6. Inisiasi (Initiation) : Pemimpin lokal mampu memberikan informasi
7. Stabilisasi (Stabilization) : Monitoring dinamika sosial ekonomi masyarakat
8. Konfirmasi/Perluasan (Confirmation/Expansion) : Pembangunan kegiatan yang melibatkan masyarakat
9. Profesionalitas (Professionalization) : bekerja sama dengan masyarakat untuk mengevaluasi dan memodifikasi program.

Proses kesiapan masyarakat tidak selalu berjalan secara berurutan dan tidak semua orang akan melewati tahap-tahap yang sama. Namun, tahap-tahap kesiapan dapat memberikan gambaran bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan atau tantangan. Selain memahami tingkat kesiapan masyarakat, penting juga untuk mengetahui bagaimana masyarakat menyesuaikan diri sebagai reaksi terhadap pembangunan yang sedang atau telah terjadi.

Menurut (Armitage, 2005) menyebutkan bahwa Kapasitas adaptasi meliputi kemampuan bersama masyarakat untuk belajar, bereksperimen, dan menemukan solusi inovatif dalam situasi sosial atau lingkungan yang kompleks. Proses perencanaan pembangunan melampaui aspek fisik dan juga meliputi kesiapan masyarakat dalam menghadapi pembangunan. Persiapan penting untuk menciptakan kondisi hidup yang seimbang antara masyarakat dan lingkungan. Dalam situasi ini, kesiapan masyarakat dipahami sebagai kondisi yang optimal dari segi sosial, ekonomi, dan

lingkungan dan dapat menahan dampak dari perencanaan pembangunan Kawasan Wisata.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu yang dilakukan untuk memesifikasi suatu kegiatan dengan cara memberikan arti untuk memberikan arti penerlitan tersebut. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan maka perlu operasionalnya untuk mengamati dan menggambarkan tentang apa yang diteliti. Definisi operasional digunakan untuk mengoperasikan penelitian yang sesuai dengan kondisi lapangan. Berdasarkan para ahli definisi operasional memiliki arti sebagai berikut:

Sebagaimana dirumuskan oleh (Edwards et al., 2000) model kesiapan masyarakat diciptakan untuk menilai reaksi masyarakat terhadap tindakan kebijakan, program, atau proyek. Berikut adalah sembilantahapan kesiapan masyarakat :

1. Tidak ada kesadaran (*No Awareness*): Masyarakat umumnya tidak menyadari masalah sebagai masalah

Penyandang disabilitas tidak menyadari adanya digitalisasi modern yang berkembang pesat saat ini. Penyandang disabilitas hanya fokus dengan apa yang ada dilingkungan sekitar mereka sehingga tidak menyadari adanya digitalisasi yang berkembang saat ini.

2. Penolakan (*Denial*): Hanya sejumlah kecil elemen masyarakat yang mengenal isu

Pada penyandang disabilitas tidak ada penolakan tentang adanya digitalisasi karena penyandang disabilitas tidak menyadari adanya perkembangan digitalisasi yang berkembang saat ini. Dengan adanya keterbatasan fisik dan lingkungan yang kurang mendukung adanya digitalisasi untuk penyandang disabilitas itu sendiri.

3. Tidak Sadar (*Vague Awareness*): Sedikit yang menyadari potensi lokal dan minimnya informasi tentang program atau kegiatan

Digitalisasi sudah diketahui banyak orang sejak lama tetapi bagi penyandang disabilitas digitalisasi merupakan hal yang baru diketahui bahkan ada yang belum mengetahui. Dengan penemuan ini maka akan mempengaruhi perubahan pola pikir penyandang disabilitas untuk mengenal lebih banyak informasi luar.

4. Persiapan (*Preparation*) : Masyarakat mulai berorganisasi

Pada penyandang disabilitas tentu tidak ada kesiapan tentang adanya digitalisasi, karena adanya faktor ekonomi yang kurang mendukung dan keterbatasan fisik yang tidak memadai untuk berkembangnya digitalisasi di lingkungan tersebut.

5. Perencanaan Awal (*Preplanning*) : Pemahaman jelas mengenai masalah lokal dan tindakan yang diambil

Digitalisasi memang harus memerlukan perencanaan, apalagi untuk penyandang disabilitas harus ada perencanaan yang matang karena jika digitalisasi sudah masuk di kehidupan penyandang

disabilitas, maka digitalisasi tersebut akan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup penyandang disabilitas.

6. Inisiasi (*Initiation*) : Pemimpin lokal mampu memberikan informasi

Adanya digitalisasi tindakan pemerintah sangat penting untuk menunjang berkembangnya atau proses masuknya digitalisasi untuk penyandang disabilitas. Digitalisasi untuk penyandang disabilitas harus ada bimbingan penuh jika digitalisasi tersebut akan berkembang di kalangan penyandang disabilitas.

7. Stabilisasi (*Stabilization*) : Monitoring dinamika sosial ekonomi masyarakat

Pada penyandang disabilitas untuk adanya digitalisasi yang masuk di kehidupan akan sangat berpengaruh dengan faktor ekonomi yang tidak memungkinkan.

8. Konfirmasi/Perluasan (*Confirmation/Expansion*) : Pembangunan kegiatan yang melibatkan masyarakat

Dengan adanya digitalisasi, untuk penyandang disabilitas harus ada prosedur yang profesional tentang perkembangan penyandang disabilitas untuk menerima program yang akan dijalankan yaitu digitalisasi tersebut. Pengaruh digitalisasi ini semakin lama akan menggeser budaya yang sudah melekat pada masyarakat sebelumnya. Terdapat dampak positif dan negatif dengan dunia digitalisasi ini, oleh karena itu harus dilakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat.

9. Profesionalitas (*Professionalization*) : bekerja sama dengan masyarakat

Dalam menunjang adanya digitalisasi untuk penyandang disabilitas harus ada bimbingan yang profesional. Pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada sebagai penunjang kehidupan sehari-hari dengan diperbarui oleh sumber daya baru untuk memperbaiki sistem. Hal ini dapat dipengaruhi oleh era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Dampak dari digitalisasi sangat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat.

Proses kesiapan masyarakat tidak selalu berjalan secara berurutan dan tidak semua orang akan melewati tahap-tahap yang sama. Namun, tahap-tahap kesiapan dapat memberikan gambaran bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan atau tantangan. Selain memahami tingkat kesiapan masyarakat, penting juga untuk mengetahui bagaimana masyarakat menyesuaikan diri sebagai reaksi terhadap pembangunan yang sedang atau telah terjadi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi (Sugiyono 2017). Dengan pendekatan kualitatif ini maka dapat digambarkan secara

realistis kondisi lapangan dengan penyampaian secara deskriptif oleh peneliti. Pendekatan kualitatif ini menyajikan sebuah fenomena yang mendalam dan berdasarkan realita dengan penyajian secara runtun.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang penting terutama dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan penelitian sudah ditentukan, sehingga mempermudah penulis dalam penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui kondisi kampung disabilitas atau kampung idiot yang masyarakatnya belum mengenal dunia digital. Desa Sidoharjo juga merupakan desa yang jumlah penyandang disabilitasnya paling tinggi di Ponorogo dan peran pemerintah desa sangat penting untuk memberdayakan masyarakat tersebut.

3. Penentuan Informan

Proses penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik Purposive sampling. Yang paling mendasar dalam teknik ini yaitu anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa : Sarmin

- b. Sekretaris Desa : Indadi
- c. Bendahara Desa : Haryuni, S. Sos
- d. Kepala Dusun : Katimun S. Pd
- e. Masyarakat non-disabilitas : Bu Dian

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti atau subjek kejelasan informasi tentang pengambilan data dalam penelitian.

a. Data primer

Data primer adalah data yang paling pertama diperoleh oleh peneliti yang berasal dari hasil wawancara individu atau perseorangan dan dapat juga berasal dari kuisioner. Data primer penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang menangani penyandang disabilitas yang belum mengenal dunia digital.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan bentuk sudah jadi atau dalam bentuk tabel atau diagram yang sudah diolah lebih lanjut. Data sekunder ini telah dikumpulkan oleh pihak lain sebagai dokumen pribadi atau resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik yang melibatkan kegiatan secara

terus menerus yang bersifat alami dan akan menghasilkan fakta (Sugiyono 2017). Pada penelitian kualitatif observasi yang dilakukan belum jelas dan belum memiliki struktur karena fokus penelitian belum jelas. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan hanyalah mencatat bebas tentang apa yang ditemukan di lapangan tanpa adanya kesimpulan yang pasti. Proses yang dilakukan ini untuk mengamati fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung atau face to face atau secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan data yang berasal dari tangan pertama (data primer), sebagai pelengkap teknik pengumpulan data dan hasil dari pengumpulan data (Sugiyono 2017). Wawancara dilakukan sebagai data pendukung apabila kuisioner yang diberikan kurang menunjukkan hasil yang maksimal sehingga wawancara dapat memperoleh informasi secara valid yang diperoleh dari informan tentang kondisi kampung disabilitas di Desa Sidoharjo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk historis. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi demografis desa, arsip desa data penduduk,

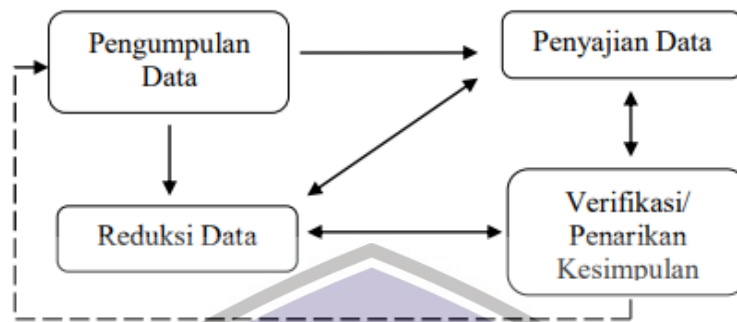
dokumen penyandang disabilitas, jurnal, buku dan sumber kepustakaan lainnya.

6. Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2017) analisis data sebagai proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, disertai petunjuk bagaimana membagi data menjadi unit-unit, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, dan menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Pengelompokan yang sesuai dengan tema serta gambar yang dapat dipahami oleh orang lain.

Variasi data yang sangat tinggi disebabkan oleh penggunaan data dari berbagai sumber, penggunaan metodologi pengumpulan data yang berbeda (triangulasi), dan pelaksanaan penelitian secara terus menerus. metode analisis data ketika melakukan penelitian dengan model Miles dan Huberman. Dalam buku (Sugiyono 2017), Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.

Untuk memastikan bahwa data sudah jenuh, proses interaktif digunakan di seluruh proses analitik untuk menghasilkan data kualitatif. Dalam buku (Sugiyono 2017) Miles dan Huberman memberikan analisis umum pola tersebut dengan memanfaatkan model interaktif sebagai berikut:



Teknik analisis data yang disebutkan diatas terdapat 4 tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu proses pengukuran informasi data yang didapat berdasarkan kebutuhan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu berasal dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti.

b. Reduksi Data

Mereduksi data melibatkan merangkum, memilih informasi yang paling penting, berkonsentrasi pada rincian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, mencari tema dan pola, dan pada akhirnya menghasilkan gambaran yang lebih jelas yang memudahkan pengumpulan data tambahan. Reduksi data dilakukan untuk merangkum atau memilih data pokok yang akan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan mengenai masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo yang belum mengenal dunia digital.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Menurut (Sugiyono 2017) penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat atau melalui bagan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penyampaian penelitian dan dapat dilakukan penelitian selanjutnya berdasarkan penyajian data tersebut.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Proses ini merupakan proses paling akhir dalam analisis data. Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif bisa saja mengacu pada rumusan masalah yang asli, karena seperti telah disebutkan sebelumnya, permasalahan dan rumusan masalah pada penelitian jenis ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan dilakukannya penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dapat berupa gambar atau deskripsi objek sebelumnya yang masih kabur namun diklarifikasi selama penyelidikan.

Analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada setelah selesai mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah selesai menganalisis maka dapat

digambarkan kondisi objek penelitian dengan kata-kata yang bersifat naratif sehingga penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang sesuai.

